



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCHAMAD SUGIARTO
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 863948

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **555.980.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. Tanah Seluas 554 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 212.380.000
3. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 103.600.000
4. Tanah Seluas 117 m2 di KAB / KOTA KUDUS, WARISAN Rp. 75.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/45 m2 di KAB / KOTA KUDUS, WARISAN Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **698.000.000**

1. MOBIL, EXPANDER CROSS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
3. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **11.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	384.266.901
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.649.246.901
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.649.246.901

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.